



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KIKI YULIATI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 907432

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.529.576.000
1. Tanah Seluas 33475 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI		
Rp. 1.205.100.000		
2. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI		
Rp. 513.876.000		
3. Bangunan Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI		
Rp. 105.000.000		
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI		
Rp. 705.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	365.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	125.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	243.278.869
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.262.854.869
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.262.854.869

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.